

## Politik Islam Nusantara Said Aqil Siraj di Media Massa

Imam Ghozali

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis*  
*imamghozali2023@gmail.com*

### Abstract

This article aims to examine the political thoughts of Islamic Nusantara Said Aqil Siraj in the Mass Media. His various ideas in introducing peaceful, polite and cultured Islamic teaching in accordance with the character of Indonesia society through the mass media received negative attacks from group in the name off Nahdlatul Ulama Garis Lucu, caliphate fighters and religious figures who lost in the 2019 presidential election. Said Aqil Siraj's open resistance against the onslaught of haters of Islam Nusantara as a from of Islamic politics in order to introduce the essence of Islamic teachings in multicultural, ethnic, tribal and religious society through his thoughts in the mass media. This research takes the form of a research library, namely collecting data related to said aqil siraj's statements in the mass media, carrying out classification, analysis and drawing conclusions. The research result; first, Islam Nusantara which was developed by Said Aqil Siraj is an Islam that can coexist with culture and needs each other in certain ways. This problem will have implicatiions for the understanding and characteristics of the Indonesian Islamic community in behaving, speaking and behaving according to Indonesian culture without giving up their identity as a muslim who is obedient to Allah. Second, Islam Nusantara has implication for the political views of Islam Nusantara, which is Said Aqil Siraj' strategi to introduce to the public that the Indonesian political system with the ideology of Pancasila and the concept of a Nation State in the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia does not conflict with Islamic law.

**Keywords:** Indonesian Islam, Islamic Sharia, Mass Media, Politics, Said Aqil Siraj

### Abstrak :

Artikel ini bertujuan meneliti pemikiran politik Islam Nusantara Said Aqil Siraj di Media Massa. Berbagai pemikirannya dalam memperkenalkan ajaran agama Islam yang damai, santun dan berbudaya sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia melalui media massa mendapat serangan negatif dari kelompok yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama Garis Lurus, para pejuang khilafah dan tokoh agama yang kalah dalam pemilihan presiden 2019. Perlawanan terbuka Said Aqil Siraj melawan gempuran para pembenci Islam Nusantara sebagai bentuk politik Islam dalam rangka memperkenalkan hakikat ajaran Islam kehidupan masyarakat yang multikultural, etnis, suku dan agama melalui pemikiran-pemikirannya di media massa. Penelitian ini berbentuk library riset yaitu melakukan pengumpulan data berkaitan dengan statement Said Aqil Siraj di media massa, melakukan klasifikasi, analisis dan diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian: pertama, Islam Nusantara yang dikembangkan oleh Said Aqil Siraj adalah Islam yang bisa berdampingan dengan budaya dan saling membutuhkan dalam hal-hal tertentu. Ini akan

berimplikasi pada suatu pemahaman dan karakteristik masyarakat Islam keindonesiaan dalam bersikap, berbicara dan berperilaku dengan budaya Indonesia dengan tidak melepaskan identitas sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah s.w.t. Kedua, Islam nusantara berimplikasi pada pandangan politik Islam Nusantara merupakan strategi Said Aqil Siraj untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sistem politik Indonesia dengan ideologi Pancasila dan bentuk negara bangsa dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci :** Islam Nusantara, Media Massa, Politik, Said Aqil Siraj, Syariat Islam

## A. PENDAHULUAN

Agama Islam yang masuk ke Nusantara merupakan sebuah tipologi keberagamaan Islam yang ada di wilayah Nusantara. Ia merupakan agama yang membawa risalah sebagaimana agama-agama sebelumnya yang dibawa para Rasul, yaitu membawa misi tauhid. Ajaran tauhid nabi Muhammad bukan sebatas pengakuan ke-esa-an kepada Tuhan, namun juga mempunyai implikasi pada kehidupan muamalah untuk menciptakan kemaslahatan umum.<sup>1</sup> Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi peradaban telah mengajarkan seperangkat nilai-nilai ajaran-ajaran yang bersifat universal seperti keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan menghargai keberagaman manusia dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan keamanan. Keberagaman hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan sebenarnya sudah pada awal kekuasaan Islam. Konstitusi Madinah telah menempatkan kesetaraan hak dan kewajiban serta melindungi kelompok minoritas seperti kelompok agama Nasrani, Yahudi dan Majuzi.<sup>2</sup>

Ketika Islam masuk ke Indonesia ada dua kelompok secara garis besarnya yaitu: pertama, perkembangan kelompok Islam sufi sebagai kelompok Islam moderat yang mewarnai yang menyebar di seluruh wilayah nusantara termasuk daerah-daerah sekitarnya. Kedua, munculnya pemahaman pemikiran Islam ortodok, fundamentalis dan reformis yang sangat besar dipengaruhi dari pemikir-pemikir Islam yang beragam baik pemikir klasik dan reformis serta fundamentalis.<sup>3</sup>

Kehidupan umat Islam nusantara yang tenang dan damai dengan pendekatan budaya yang hidup dimasyarakat mendapatkan tantangan dari ideologi transnasional masuk ke Indonesia. Kelompok tersebut membawa pemahaman agama yang tidak ramah dengan kehidupan modern dan harmonisasi kehidupan antara sesama manusia.<sup>4</sup> Dengan pendekatan secara massif membawa isu-isu politik dan agama melalui buku, majalah dan bulletin. Selain itu kemajuan teknologi menjadi alat untuk mengkampanyekan agenda politik transnasional melalui media social, media online dan jaringan internet lainnya. Dengan konsep menegakan *Khilafah Islamiyah* dan kembali kepada ajaran murni bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah<sup>5</sup> dan melakukan infiltrasi<sup>6</sup> menyerang kelompok-kelompok organansi dan para tokoh Islam yang

---

<sup>1</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran" 2, no. 1 (2017): 49.

<sup>2</sup> Ahmad Sukarja, "Piagam Madinah Dan UUD Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk," in *Sinar Grafika* (Jakarta, 2012), 2.

<sup>3</sup> Sumanto Al Qurtuby, "Public Islam in Southeast Asia: Late Modernity, Resurgent Religion, and Muslim Politics," *Studia Islamika* 20, no. 3 (2013): 399-442, <https://doi.org/10.15408/sdi.20.3.511.399-442>.

<sup>4</sup> Sumanto Al Qurtuby, "Calling for an 'Islamic Protestantism' Calling For " Islamic Protestantism " In Indonesia And Beyond Towards Democratic and Pluralistic Islam," *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 01 (2008): 151-77.

<sup>5</sup> Al Chaidar, "Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII SM Kartosoewirjo Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama Dan Orde Baru," 1999.

<sup>6</sup> Herdi Sahrasad et al., "Reviewing Al-Qaeda's Infiltration in Indonesia: A Historical Reflection," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 27, no. 2 (2019): 395-424, <https://doi.org/10.21580/ws.27.2.3739>.

dianggap bersebarangan dengan mereka. Salah satu yang gerakan penggunaan simbol agama untuk kepentingan politik yaitu gerakan politik 212 dan 411 pada tahun 2018.<sup>7</sup>

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang paling konsisten menjaga nilai-nilai keberagaman dan kemoderatan mendapatkan tantangan terberat menghadapi gerakan politik transnasional yang mempunyai cita-cita tegaknya syariat Islam dan menghapus ideology pancasila. Kelompok-kelompok kaum ekstrimis di atas secara terang-terangan menyerang Said Aqil Siradj sebagai ketua PBNU. Berbagai tuduhan yang kepada seperti antek yahudi, penganut syiah, dan perusak ajaran islam dengan konsep “Islam Nusantara” yang sering digaungkan oleh nya dalam setiap pertemuan baik di internal maupun eksternal NU. Salah satunya yaitu ketua Majelis Ulama Indonesia [MUI] Sumater Barat, Buya Guzrizal Gazahar yang menolak penyebutan istilah tersebut sebagai bentuk penambahan Islam.<sup>8</sup>

Kelompok garis keras melakukan pembunuhan karakter terhadap Said Aqil Siraj karena tidak sejalan dengan cita-cita besar sebagai gerakan politik transnasional. Sebagai suatu konsep, fundamentalisme menandakan tiga unsur: (1) fenomena keagamaan, (2) penolakan terhadap perubahan sosial dan budaya, dan (3) reaksi defensif dengan berupaya mempertahankan atau merestorasi tatanan sosial masa lalu yang diidealkan atau diimajinasikan sebagai paling otentik dan benar. Berkaitan persoalan yang telah terjadi, pendekatan bersifat irasional dan mempresepsikan segala sesuatu kekal abadi. Sementara masa kini dan masa depan dipandangnya dalam kerangka *eskatologis*.<sup>9</sup>

Kajian-kajian pemikiran Said Aqil Siraj, antara lain: Pertama, Hasan Baharun dan Farah Nuril Badriyah meneliti tentang pendidikan multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat beragam suku, agama, dan budaya serta etnis merupakan kodrat dari bangsa Indonesia yang tidak bisa dihindarinya. Fakta tersebut membutuhkan pola hidup saling menghargai diantara mereka. Pendidikan ini sangat penting dalam menjaga pengaruh intoleransi dan radikalisme saat ini berkembang di Indonesia.<sup>10</sup> Kedua, Fatmawaton meneliti tentang kritik Said Aqil Siraj terhadap dakwah di Indonesia yang sering membuat resah dengan suka membid'ahkan dan menyalahkan serta menuduh orang lain tidak beriman saat melihat sebagian dari saudaranya dalam beribadah tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Pandangan tersebut merupakan sikap eksklusif yang berujung pada sikap *radikalisme* dan intoleransi terhadap keberagaman beragama.<sup>11</sup> Ketiga, Muhammad Endy Fadlullah membahas tentang *Aswaja* sebagai jalan mengkaji pemikiran dalam beragam aspek kehidupan dengan mendasar pada pemikiran yang moderat dengan tetap merujuk pada akidah Imam dua yaitu al-Asy'ari dan al-Maturidi.<sup>12</sup> Keempat, Luluatu Nayiroh mengkaji tentang pemikiran dan aktivitas dakwah Said Aqil Siraj yang sangat kompleks. Pemikirannya berkaitan dengan politik kebangsaan, kecintaan terhadap budaya, dan mengajarkan tentang pentingnya Islam nusantara.<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Mutiah Setiawati, “Democratic Political Contestation: State, Islam and Media in Indonesia’s Reformative Era,” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 34-50, <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.34-50>.

<sup>8</sup> Benny Ridwan et al., “Islam Nusantara, Ulemas, and Social Media: Understanding the Pros and Cons of Islam Nusantara among Ulemas of West Sumatera,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 163-88, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.163-188>.

<sup>9</sup> Mun'im A Sirry, “Membendung Militansi Agama, Iman Dan Politik Dalam Masyarakat Modern” (Jakarta: Erlangga, 2003), 3.

<sup>10</sup> Hasan Baharun, “Pendidikan Multikultural Dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 37-51.

<sup>11</sup> A Hasyim, *Kritik Terhadap Teologi Wahabiyyah Di Indonesia Dalam Pemikiran Said Aqil Siradj*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2019, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49955>.

<sup>12</sup> Muhammad Endy Fadlullah, “Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Dalam Perspektif Said Aqil Siradj,” *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 33-43, <https://doi.org/10.31538/nidhomulhaq.v3i1.107>.

<sup>13</sup> Luluatu Nayiroh, “Pemikiran Dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. K.H Said Aqil Siroj,” *Skripsi*, 2013, 1-123.

Peneliti menemukan beberapa persamaan dengan para peneliti sebelumnya, yaitu: pertama, penelitian berkaitan dengan Said Aqil Siraj berpijak pada dasar pemikirannya tentang Islam *washatiyah* yaitu Islam *Ahlusunnah walJamaah* dengan merujuk pada pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi pada bidang akidah, dan pada bidang tasawuf merujuk pada pemikiran Junaidi Al-Baghadi dan Imam Al-Ghozali. Kedua, kedua bidang akidah dan tasawuf dengan pendekatan pemikiran para ulama tersebut telah mewarnai pemikiran moderat Said Aqil Siraj dalam melihat keberagaman budaya, sehingga ia bisa menerima budaya yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari pola hidup dengan keberagaman dan saling menghargai atas keberagaman tersebut.

Perbedaannya, penulis artikel ini mengkaji tentang persoalan politik praktis pada Pilpres 2019. Penulis memfokuskan pada penelitian Politik Islam Nusantara Said Aqil Siraj di Media Massa pada dua kajian: pertama, Islam Nusantara sebagai Islam yang inklusif dengan menerima kehadiran budaya sebagai bagian jatidiri bangsa dengan tidak menjalankan ajaran agama Islam. Kedua, prinsip politik Islam Nusantara sebagai wujud politik kebangsaan yang menjadi kesepakatan bersama dalam bentuk ideology negara Pancasila dan negara bangsa [*nation state*]. Subtansi pemikiran Said Aqil Siraj pada aspek lain bisa diterima, namun pada aspek politik menjelang pilpres 2019, Said Aqil Siraj benar-benar berhadapan secara langsung terhadap kelompok-kelompok pengusung ideologi transnasional yang bercita-cita ingin mendirikan *khilafah islamiyah*. Sebab pemahaman khilafah tersebut jelas bertentangan dengan konsep politik Islam Nusantara yang jelas-jelas mendukung konsep *nation state*. Pada titik ini, penelitian pemikiran Said Aqil Siraj menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, terutama berkaitan dengan Islam Nusantara dan model politik Islam Nusantara yang pemikirannya tersebar di Media Massa.

## B. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan guna menghimpun dan menganalisis data yang berasal dari kepustakaan<sup>14</sup> dengan cara melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Pertama, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Pemikiran Politik Islam Nusantara Said Aqil Siraj; Kedua melakukan seleksi dan klasifikasi beberapa data yang sudah dikumpulkan; Ketiga, menggunakan data-data yang telah digunakan untuk menganalisis penelitian; Keempat menyimpulkan hasil analisis dalam bentuk kesimpulan. Penelitian kepustakaan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang kondisi yang kompleks dan arah bagi penelitian dengan melakukan analisis-analisis yang kemudian bisa diambil kesimpulannya.<sup>15</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Islam Nusantara dan Politik

Islam merupakan ajaran dengan karakter universal keberlakukaanya. Universalitas keberlakukan hukum Islam terlihat pada nilai-nilai nya ( universal value) yang mencakup cabang-cabang aturan ( *faru'iyah*) yang terbuka untuk berbeda pandangan karena adanya pada perbedaan geografis dan unsur-unsur lainnya.<sup>16</sup> Peluang keberagaman tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibilitas dan elastisitas dalam merespon beragam persoalan, termasuk persoalan-persoalan hubungan politik dan Negara. Sehingga saat sekarang

---

<sup>14</sup> Asep Kurniawan, "Metodologi Penelitian Pendidikan," ed. Nita Nur M (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2018), 1-408.

<sup>15</sup> Kurniawan.

<sup>16</sup> Ahmad Imam Mawardi, "Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan" (Yogyakarta: LKiS, 2010), 2.

ini tiga keterkaitan dalam memahami persoalan agama dan negara, yaitu : hubungan secara integralistik, simbiotik, dan sekularistik.<sup>17</sup>

Hubungan agama dan negara secara integralistik menunjukkan bahwa antara negara dan agama dipresepsikan sebagai satu kesatuan mutlak. Karena itu partai politik yang berideologi agama senantiasa memperjuangkan cita-cita tersebut melalui beragam cara baik dengan pendekatan revolusi maupun evolusi. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan Negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” yang beranggapan bahwa kedaulatan mutlak hanya milik Allah s.w.t.<sup>18</sup> Itu sebabnya ormas-ormas Islam terlarang yang telah dibubarkan oleh pemerintah sering berafiliasi dengan partai-partai Islam menganggap ideologi dan sistem negara seperti ideologi pancasila dan NKRI dianggap *toghut* dan perlu diganti dengan cara-cara islami sebagaimana yang telah dicontohkan para periode awal perkembangan Islam.<sup>19</sup>

Hubungan agama dan Negara secara simbiotik memperlihatkan bahwa Islam adalah agama paripurna. Namun pengertian tersebut pada sisi ketuntasan pada wilayah ibadah dan dengan perangkat nilai-nilai universal yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik atau berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai universal menjadi sumbangsih agama dalam menyusun suatu konstitusi negara sehingga selaras dengan nilai-nilai Islam. Kedua bersifat komplementer dan saling membutuhkan. Agama memerlukan keberadaan Negara untuk melindungi eksistensinya, sedangkan Negara membutuhkan agama untuk melindungi konstitusi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai *Ilahiyah*.<sup>20</sup>

Hubungan agama dan negara secara sekularistik adalah memandang bahwa Islam tidak membahas persoalan spesifik tentang politik dan negara. Sistem pemerintahan yang pernah lahir pada masa lalu merupakan respon dari keadaan pada saat tanpa ada petunjuk teknis baik dalam hukum Islam. Sistem negara atau pemerintahan merupakan hasil intelektual yang mempunyai pandangan beragam dalam rangka mengorganisasikan Negara sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan peradaban manusia.<sup>21</sup>

Di Indonesia hubungan negara dan agama adalah saling menguatkan. UUD 1945 menjamin semua penganut agama bisa menjalankan ajarannya. Mereka mempunyai kedudukan sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dan dijamin secara hukum dalam konstitusi.<sup>22</sup> Sedangkan berkaitan dengan Negara, pemerintahan ditilik dan dinilai dari fungsionalisasinya, bukan dari norma formal dan eksistensinya, negara Islam atau bukan. Dan dalam pandangan mazhab Syafi'i posisi yang demikian pada posisi netral. Format Negara Indonesia yang masuk pada kriteria Negara damai atau *dar al-shulh* harus dipertahankan, karna syari'at (dalam bentuk hukum agama/fiqh atau etika masyarakat) masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya. Walaupun tidak melalui legislasi dalam bentuk undang-undang Negara<sup>23</sup>

Sedangkan Islam nusantara sebenarnya Islam yang ada di Nusantara. Ia bukan agama baru, namun corak geografis, adat kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup di daerah tersebut telah

---

<sup>17</sup> Imam Ghozali, “Memahami Format Demokrasi Model Khawarij Di Indonesia ( Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019),” *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 21, No. 1 (2020): 1.

<sup>18</sup> M. Din Samsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000).

<sup>19</sup> Imam Ghozali, “Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia; Muhammadiyah Dan NU Vs FPI Dan HTI,” *Al-Qalam* 37, no. 1 (2020): 27-48.

<sup>20</sup> Munawir Sadjali, “Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,” in *UI-Press* (Jakarta, 2011), 140.

<sup>21</sup> Samsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*.

<sup>22</sup> Abdurrahman dan Daisaku Ikeda Wahid, “Dialog Peradaban Untuk Toleransi Dan Perdamaian” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 170.

<sup>23</sup> Abdurrahman Wahid, “Kata Pengantar (1) Mati Ketawa Cara Rusia,” in *Sekadara Mendahului, Bunga Rampai Kata Pengantar*, ed. Tri Agus S Siswiharjo (Bandung: Nuansa, 2011), 53-56.

membentuk ajaran Islam yang sangat akomodatif dengan keberagaman agama, budaya, suku dan etnis yang ada di Indonesia. Islam Nusantara yang berwajah toleran dan moderat dapat menjadi model yang bisa mengubah pandangan negatif Negara-negara barat terhadap Islam selama ini. Oleh karena itu, Islam Nusantara yang lentur terhadap budaya lokal perlu lebih dikenalkan ke dunia internasional. Islam bisa hidup rukun dengan agama lain dan berakulturasi dengan budaya lokal yang bisa berdampak secara demokratis.<sup>24</sup>

Menurut Abdurrahman Wahid bahwa Islam yang hidup di Indonesia adalah Islam yang tidak lepas dari peradaban-peradaban sebelumnya yaitu Hindu, Budha dan kemudian Islam. Ajaran Islam dengan keberagaman budaya tersebut melahirkan kesadaran nasionalisme yang kuat untuk melindungi keberagaman agama, keyakinan, budaya, tradisi bangsa Indonesia. Karenanya, dalam konteks politik, ketika Pancasila dijadikan ideology Negara, umat Islam menerima sebagai wujud menghargai kemaslahatan umum dan menolak formalisasi agama sebagai ideologi Negara.<sup>25</sup> Ini konsekuensi dari tidak mungkin mendirikan Negara Islam yang menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi “*ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh*”, yang berarti “apa yang tidak mungkin terwujud seluruhnya, tak boleh ditinggalkan yang terpenting ( didalamnya)”<sup>26</sup>. Karenanya, keberagaman tersebut sebagai pemersatu untuk melestarikan variasi budaya selama ini<sup>27</sup> sebagai bangun politik untuk melahirkan konsep negara damai atau *dar al-shulh*.

Karenanya, ajaran Islam *ahlusunnah wa al-jama'ah* sebagai sumber pemikiran Islam di Nusantara seharusnya tidak dipahami sebatas dogma yang kaku, namun perlu diformulasikan secara luas tentang pandangan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, pengaturan kehidupan, hubungan individu dan masyarakat, tradisi dan dinamisasinya, tentang cara-cara pengembangan kehidupan masyarakat dan tentang asas-asas internalisasi dan sosialisasi yang dapat dikembangkan dalam konteks doktrin formal yang dapat diterima saat ini.<sup>28</sup> Maka dalam konteks hukum Islam, *ahlusunnah wa al-jama'ah* merespon suatu aktivitas masyarakat yang telah melembaga dengan menggunakan pendekatan *al'adat muhakamah* (kebiasaan menjadi suatu hukum). Ia menjadi bagian dari fiqh dalam rangka menggali adat atau budaya masyarakat sehingga maknanya bukan sesuatu yang bersifat universal untuk diberlakukan pada tempat tempat tertentu.<sup>29</sup> Disini berarti konsep Islam *Aswaja* menjadi dasar operasional dalam membentuk cara pandang *dar al-shulh* sebagai solusi konstruktif untuk seluruh komponen masyarakat yang beragam.

Hal senada Afifuddin Muhajir mengatakan bahwa negara Indonesia didirikan oleh beragam masyarakat yang berbeda dalam suku, etnis dan agama memberikan definisi khilafah ke Indonesia-an. Itu sebabnya perubahan dari sila : ‘Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa’ menunjukkan ketulusan dan kebesaran jiwa umat Islam yang lebih mementingkan persamaan dan kesatuan bangsa daripada kepentingan golongan.<sup>30</sup> Pemaknaan dari kalimat tersebut sangat kuat dasar berfikir politik Afifuddin Muhajir dengan pandangan Nash Al-Qur'an dan Hadist. Menurutnnya

---

<sup>24</sup> Said Aqil Siraj, “Nasionalisme Islam Nusantara,” in *Kompas*, ed. Abdullah Ubaid Mohammad Bakir (Jakarta: Kompas Media Utama, 2015), 1-275.

<sup>25</sup> Wahid, “Kata Pengantar (1) Mati Ketawa Cara Rusia.”

<sup>26</sup> Wahid.h. 211.

<sup>27</sup> Baharun, “Pendidikan Multikultural Dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj.”

<sup>28</sup> Tejo Waskito, “Geneologi Revolusi Paradigma Pemikiran Keislaman Nahdlatul Ulama,” *AL-A'RAF XV*, no. 2 (2018): 1-35, <https://doi.org/10.30649/fisheries.v2i2.43>.

<sup>29</sup> Asni, “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 54-69, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/699>.

<sup>30</sup> Afifuddin Muhajir, “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushūsh Dan Maqāshid); Orasi Ilmiah Penganugerahan Doctor HC” (UIN Wali Songo Semarang, January 20, 2021).” (Semarang, 2021).

bahwa apapun yang dilakukan baik dalam melakukan hubungan komunikasi dengan Tuhan dan melakukan kegiatan sosial politik tidak terlepas dari ajaran Islam yang tertera dalam kedua Kitab Suci tersebut.<sup>31</sup>

## 2. Politik Islam Nusantara Perspektif Said Aqil Siraj

Said Aqil Siraj adalah seorang ulama pembela paham *Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah* kelahiran desa Kempek Cirebon pada tanggal 3 Juli 1953. Ulama yang sering dipanggil Kang Said merupakan putra dari K.H. Aqil Siraj. Sejak kecil Kang Said sudah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya dan Pendidikan Pesantren Lirboyo Jawa Timur. Pendidikan S1 dari Universitas Kang Abd Al-Aziz Jurusan Syariah tahun 1982. Melanjutkan S2 dan S3 pada Fakultas Ushuluddin Umul Quro Makkah. Sedang S3 atau program doktor selesai pada tahun 1994 dengan predikat cumlaude.<sup>32</sup>

Perkenalan dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuat Kang Said jatuh hati atas kedalaman ilmunya, terutama ilmu-ilmu tasawuf yang kebetulan menjadi bidang penelitian Kang Said saat kuliah di Umul Qura, Mekah. Itu sebabnya pemikiran Kang Said sebenarnya merupakan representasi dari kelanjutan pemikiran dari Gus Dur berkaitan dengan kebinekaan, kebangsaan, kecintaan terhadap kearifan lokal dan mengembangkan Islam yang inklusif. Itu sebabnya saat muhtamar Cipasung, Kang Said dituduh sebagai agen Syi'ah<sup>33</sup> dan mendapat penolakan dari para kyai NU waktu itu. Peristiwa ini suatu bentuk perbedaan Kang Said dalam memahami NU dengan para kyai yang bersifat fiqh *oriented*, sedangkan Kang Said dengan pendekatan teologi sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Dur. Pada tahun 1994 setelah menyelesaikan doktornya kang said kembali ke Indonesia dan Gus Dur mengajak untuk bergabung dalam kepengurusan NU sebagai Wakil Katib Aam PBNU dari muktamar ke-29 di Cipasung.<sup>34</sup> Pada muhtamar NU ke-32 di Asrama Haji Sudang, Makasar, Sulawesi Selatan Kang Said terpilih menjadi ketua PBNU. Kemudian pada muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015, dia terpilih lagi sebagai ketua PBNU.

Memang dalam berbagai pandangan, baik Gus Dur maupun Kang Said sering berbeda pendapat dengan para kyai NU. Ada dua yang membuat sebagian umat Islam marah kepadanya yaitu statemen beliau tentang “semakin panjang jenggotnya semakin bodoh”<sup>35</sup> dan “Islam Nusantara.” Walaupun demikian, Kang Said adalah seorang ulama dan pemikir yang konsisten terhadap perjuangan untuk tetap berkomitmen pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>36</sup>

Berdasarkan paparan tersebut, pemikiran Said Aqil Siraj lebih bisa disebut mengadopsi pemikiran Gus Dur yang mengembangkan pemikiran kemanusiaan dengan pendekatan teologi, dan sering mengabaikan hal-hal yang bersifat yang terlihat kaku. Akibatnya, kelompok-kelompok yang menyerang Said Aqil Siraj adalah kelompok dari ulama NU yang sangat menganut aturan fiqh yang dulunya juga menyerang kepada Gus Dur ketika menjadi ketua PBNU. Itu sebabnya, ketika Said Aqil Siraj mengatakan persoalan seperti “orang yang berjenggot cerdasnya berkurang”, “celana cingkrang”, dan “Islam Nusantara” mendapat serangan baik dari sebagian ulama NU dan luar NU sebagaimana Gus Dur mengucapkan “selamat pagi” sebagai ganti dari “assalamu’alaikum”.

---

<sup>31</sup> Rahaman Imam Ghozali, Zulfikar Hasan, Chanifudin, “Ideal Country According To Afifuddin Muhajir: Analysis Of The Scientific Speech Of The Hanouris Causa Doctoral Award At Uin Walisongo Semarang Indonesia,” *Malaysian Journal For Islamic Studies* 5, no. 1 (2021): 27-39.

<sup>32</sup> Hasyim, *Kritik Terhadap Teologi Wahabiyah Di Indonesia Dalam Pemikiran Said Aqil Siradj*.

<sup>33</sup> Said Aqil Siradj, “Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri” (Jaka: Pustaka Ciganjur, 1999).

<sup>34</sup> Farista Zulfa Khasanah, “Studi Pemikiran Said Aqiel Siradj Tentang Kesetaraan Hak-Hak Politik Perempuan Untuk Menjadi Kepala Negara” (UIN Walisongo Semarang, 2018).

<sup>35</sup> “Ini 5 Pemikiran K.H. Said Aqil Siradj Yang Dianggap Nyeleneh,” *datdut.com*, n.d.

<sup>36</sup> Khasanah, “Studi Pemikiran Said Aqiel Siradj Tentang Kesetaraan Hak-Hak Politik Perempuan Untuk Menjadi Kepala Negara.”

### 3. Prinsip-Prinsip Politik Islam Nusantara Said Aqil Siraj

#### a. Prinsip Jihad Mempertahankan NKRI

Sejarah panjang lahirnya negara Indonesia tidak terlepas dari sumbangsih perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang beragam agama dan kepercayaannya. Kareranya ketika Indonesia merdeka, semua status sama. Dalam Negara Indonesia, tidak ada warga Negara yang lebih *superior* atas nama suku, etnis, budaya dan agama. Mereka mempunyai kesempatan sama untuk memilih dan dipilih yang dilindungi oleh Konstitusi. Karena itu menurut Said Aqil Siraj, seluruh warga Negara mempunyai kewajiban untuk jihad melawan segala bentuk intoleransi. Hal ini menurutnya telah dicontohkan K.H. Hasyim Asy'ari ketika melakukan *resolusi jihad* melawan penjajah yang ingin menguasai Indonesia.

Berikut ini pandangan jihad Said Aqil Siraj yang diterbitkan pada media massa harian Kompas sebagai berikut:

Ada tiga poin penting dalam resolusi jihad yang dicontohkan oleh K.H. Hasyim Wahid. Pertama, setiap orang Islam mempunyai tanggungjawab untuk melawan orang-orang kafir yang merintangai kemerdekaan Indonesia. Kedua, para pembela negara yang telah meninggal dunia sebagai bagian mati syahid. Ketiga, para penghianat perjuangan kemerdekaan Indonesia harus dihukum mati. Resolusi jihad merupakan wujud dari mencintai tanah air sebagian dari iman. Selain itu disisi lain, resolusi jihad merupakan wujud dari perlawanan NU terhadap kolonialisme bangsa barat daripada terjebak pada pertentangan ideologi<sup>37</sup>

Pesan mendalam dari tulisan tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan suatu negara merupakan suatu kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai seorang ulama, dan santri dari para ulama, Said Aqil Siraj tidak mempermasalahkan tentang bentuk negara dan ideologinya. Baginya, apa yang telah dilakukan oleh para ulama seperti K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahid Hasyim telah melakukan suatu ijtihad yang tepat dalam merancang sistem negara dan mempertahankan keberadaannya. Tanpa adanya negara, maka tujuan dari dari syariat tidak mungkin tercapai. Itu sebabnya negara merupakan harta yang sangat mahal yang perlu dijaga sebagai bagian tujuan syariat Islam.<sup>38</sup> Negara menjadi instrument utama yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya dalam pengelolaan bernegara dalam akitvitas ekonomi, sosial dan politik yang beragam. Kepentingan mereka hanya dapat diakomodir ketika keberagaman menjadi kekuatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>39</sup>

Diantara bentuk jihad mempertahankan eksistensi negara yaitu dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan bangsa. Keberhasilan ideologi Pancasila sebagai *kalimah sawa* ( titik temu) antar ideologi yang ada di Indonesia seperti agama, nasionalis dan sosialis merupakan kejeniusan para ulama dan pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Ideologi tersebut mampu mengakomodir seluruh kepentingan warga Negara yang beragam agama, suku, etnis, budaya dan keyakinan. Berbeda dengan Negara-negara timur tengah yang saat ini konflik seperti di Palestina adalah persoalan belum ada formulasi ideologi pengikat seluruh komponen masyarakat. Akibatnya ideologi kehilangan esensinya. Ideologi yang dibutuhkan dalam politik Islam adalah ideologi yang mampu menjelaskan moral dan teologinya dalam kehidupan umat Islam itu sendiri sebagai wujud ideologi pembebasan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Said Aqil Siraj, "Resolusi Jihad, Melawan Lupa," *Kompas*, 22 Oktober, 2011.

<sup>38</sup> Agus Sunaryo, "Ushul Fiqh Dan Perubahan Sosial Telaah Kritis Epistemologi Fiqh Kontemporer," in *Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), 72-73.

<sup>39</sup> Fajar, "Demokrasi Politik Sampai Warisan Radikalisme; Sebuah Pengetahuan Nasionalisme Era Milenial," *Jurnal Politik Profetik* 6, no. 1 (2018): 74.

<sup>40</sup> Halil Ibrahim Yenigun, *Islamic Liberation Theology, American Journal of Islam and Society*, vol. 27, 2010, <https://doi.org/10.35632/ajis.v27i3.1309>.

Pandangan Said Aqil Siraj di atas menunjukkan nasionalisme merupakan suatu keharusan bagi setiap warga Negara. Nasionalisme sebagai jalan untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan serta usaha untuk membangun kehidupan lebih baik merupakan wujud dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah) dalam Islam, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Kelima *maqashid al-syari'ah* ini bisa terjaga ketika tegaknya sebuah Negara. tanpa ada nasionalisme, tidak ada negara, dan tidak ada kehidupan menjalankan syariat Islam secara baik dan benar. Sebab syariat bisa dilaksanakan dengan baik ketika adanya sebuah negara yang berdaulat.

#### **b. Menghargai keberagaman suku, budaya dan agama**

Said Aqil Siraj menegaskan bahwa ciri khas dari Islam Nusantara yaitu menghargai keberagaman suku, budaya dan agama. Menurutnya ancaman serius bangsa dan negara Indonesia saat ini dan masa mendatang antara lain adanya kelompok radikalisme menawarkan dagangan politiknya. Mereka terus melakukan Upaya politiknya dengan menyerang paham Islam tasamuh seperti NU yang mengajarkan persatuan dalam keberagaman.<sup>41</sup>

Berkaitan pentingnya persaudaraan di negara yang beragam etnis, budaya dan agama sebagaimana di Indonesia, Said Aqil Siraj mengatakan sebagai berikut:

Dalam konteks berbangsa dan bernegara persaudaraan bisa diikat atas nama agama, kemanusiaan dan kesamaan bangsa dan negara. *Ukhuwah wathaniyah* ini harus didahulukan ketimbang *ukhuwah islamiyah*. Alasannya tanpa negara, bagaimana umat Islam bisa melakukan kegiatan keagamaan?<sup>42</sup>

Pandangan Said Aqil Siraj tentang makna persaudaraan di atas merupakan sunatullah tentang hakikat manusia yang beragam. Perbedaan merupakan desain Tuhan dalam rangka untuk saling mengenal [ *ta'aruf* ] yang sudah dipraktikkan oleh nabi Muhammad dengan umat Yahudi Nasrani dan Majusi di Madinah. Itu sebabnya, NU mempunyai kewajiban untuk melestarikan ajaran al-Qur'an, al-Sunnah dan fakta sejarah politik Islam pertama pada masa nabi Muhammad s.a.w. maka tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia melakukan diskriminasi warga negara atas dasar suku, etnis, budaya dan agama.

Padangan politik yang demikian menurut Said Aqil Siraj cermin dari makna Islam Nusantara yang diwujudkan dalam kultur, *jam'iyyah* maupun *harakah* (gerakan) NU. Gerak langkah organisasi keagamaan ini, pada level jamaah (komunitas) maupun *jam'iyyah* (organisasi) menjadi referensi utuh bagaimana menyelaraskan agama, ideologi, dan rasa kebangsaan. Dalam NU, *ukhuwah basyariyah*, *islamiyah*, dan *wathaniyah* berjalan harmonis untuk membentuk konfigurasi yang selaras dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>43</sup>

Sikap konsistensi NU terhadap pandangan berbangsa dan bernegara, jelas menjadi musuh kelompok Islam garis keras. Berbagai upaya dan tuduhan terhadap NU terus dilakukan dengan tuduhan yang sangat keji sebagai tokoh agama kurang Islami bahkan kafir,<sup>44</sup> dan terulang kembali semakin mengkristal secara nyata saat pemilu 2019. Kedekatan hubungan emosional Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Joko Widodo dengan Said Aqil Siraj Karena kedua-duanya menjadi pengurus PBNU. Ini berimplikasi kepada NU secara organisasi,

---

<sup>41</sup> Siraj, "Resolusi Jihad, Melawan Lupa."

<sup>42</sup> Said Aqil Siraj, "Mendahulukan Cinta Tanah Air," *Kompas*, 11 April, 2015.

<sup>43</sup> Farooq Hassan, "The Concept of State and Law in Islam," in *University Press of America* (New York, 1981), 41.

<sup>44</sup> Abdurrahman Wahid, "Musuh Dalam Selimut," in *Ilusi Negara Islam (Ekspansi Gerakan Transnasional Di Indonesia)*, ed. Abdurrahman Wahid (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, 2019), 19.

mendapatkan sasaran serupa oleh sebagian kelompok garis keras yang menganggap dirinya paling benar dan mengkafirkan kelompok di luar mereka.<sup>45</sup>

Islam telah mengajarkan kesetaraan derajat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>46</sup> Semua harus dihargai keberadaannya sebagai bentuk penghargaan terhadap Allah swt. manusia dengan keberagaman warna kulit, bahasa, budaya dan agama mempunyai hak dan kewajiban sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun dalam mencari status ketakwaan kepada Allah s.w.t.<sup>47</sup> Namun dalam prakteknya, ajaran agama Islam yang demikian menjadi sangat eksklusif oleh kelompok ekstremis dan mereka terus menerus membangun politik identitas dalam segala kegiatan baik dalam pendidikan, dakwah dan politik. Semua dilakukan sebagai wujud pemaknaan *integralistis* ajaran Islam antara agama dan politik merupakan satu-kesatuan yang utuh.

Islam dalam menyikapi adat istiadat atau budaya yang berkembang di Indonesia sejak masa lalu ada beragam aspek: pertama, ada budaya yang secara mendasar bertentangan dengan hukum Islam; kedua ada budaya yang bukan berasal dari agama namun memperkuat identitas agama.<sup>48</sup> Disisi lain, keberagaman tersebut lahir dari peradaban yang panjang sejarah masa lalu saat Indonesia mencapai puncak kejayaan agama Hindu, Buda dan Islam. Keberagaman ini menjadi titik temu pada nilai-nilai universal dan kesepakatan bersama bahwa nasionalisme sebagai satu-satunya cara untuk menyatukan keberagaman dalam berbangsa dan bernegara.<sup>49</sup>

Pandangan Said Aqil Siraj kelihatannya berdasarkan realita sejarah bahwa agama bisa ditegakkan oleh penguasa, apapun latarbelakang agamanya. Sebagaimana sikap NU tidak mempersoalkan penguasa pada masa penjajahan Belanda, Islam bisa berkembang dengan baik. NU melihat karena Belanda melakukan penjajahan dan merugikan kepentingan umum berkaitan dengan kebebasan dan kesejahteraan, maka NU menjadi penggerak untuk melakukan perlawanan. Termasuk dalam hal ini dalam wujud resolusi jihad yang diinisiasi oleh K.H. Hasyaim Asy'ari. Itu sebabnya, kehadiran Negara harus memberi kenyamanan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, dan tidak boleh negara sebagai alat kepentingan untuk melegitimasi eksklusifitas agama atau suku tertentu. Jika demikian, negara telah melakukan pendzoliman terhadap warga negara dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Dari sini penghargaan terhadap keberagaman menjadi satu keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### c. Prinsip kritis kepada Pemerintah tanpa Bughot

Menurut Said Aqil Siraj, politik Islam nusantara sangat mengutamakan masyarakat melakukan kontribusi terhadap negara dan bangsa. Keberagaman pandangan dan politik merupakan wujud dari keberagaman perfikir dalam memperbaiki sistem politik melalui kritik yang membangun dan tidak sampai pada upaya melakukan makar atau bughot. Itu sebabnya, Saiq Aqil Siraj mengkritik keras ucapan kelompok radikal yang bersuha mengganti ideology negara dan bentuk negara NKRI. Berikut kritik nya terhadap HTI sebagai berikut:

Kelompok-kelompok Islam yang ingin melakukan pemberontakan baik secara evolusi maupun revolusi adalah kelompok radikal yang berhaluan ideologi transnasional seperti

---

<sup>45</sup> Imam Ghozali and Junaidi, "Political And Nationalism Of Gp Ansor In Facing The Perssecution Of Kirab Satu Negeri In The Meranti," *Al-Tahrir* 20, No. 2 (2020): 307-28.

<sup>46</sup> Hassan, "The Concept of State and Law in Islam."

<sup>47</sup> Syamsul Arifin et al., "Minority Muslims and Freedom of Religion: Learning from Australian Muslims' Experiences," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 295-326, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.295-326>.

<sup>48</sup> Mufdil Tuhri, Samsul Maarif, and Rikardo Simarmata, "Adat, Islam and the Idea of Religion in Colonial Indonesia," *AlAlbab* 9, no. 2 (2020): 158-78.

<sup>49</sup> Wahid, "Musuh Dalam Selimut."

HTI. Watak memberontak bukan watak Islam. Umat muslim Indonesia tidak punya akar radikal. Munculnya radikalisme dan terorisme merupakan hasil adopsi kultur keagamaan yang datang dari luar. Ia merupakan “produk impor”, layaknya sebuah produk yang diimpor dari luar negeri dan kemudian diujakan di dalam negeri.<sup>50</sup> Kalau kita benar-benar sepakat satu barisan untuk menghadapi dan menghancurkan jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapi pintu masuknya perlu dipangkas, yaitu ajaran wahabi sebagai pintu masuk terorisme.<sup>51</sup>

Pendapat Said Aqil Siraj tersebut menunjukkan ketidaksukaan terhadap politik Islam model kelompok HTI dan yang berafiliasi dengannya seperti FPI, JAD dan ISIS yang ingin mendirikan negara Islam. Menurut ketua PBNU ini, model politik Islam yang dianut oleh mereka adalah politik identitas yang tidak bisa menerima kebegaraman agama, dan menjadikan agama selain Islam sebagai warga kelas nomor dua. Sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri dan fakta sejarah negara Indonesia.

Itu sebabnya Said Aqil Siraj mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghancurkan gerakan radikalisme yang telah merambah di kalangan anak muda begitu masif. Gerakan radikalisme dengan kemasan yang sangat islamis telah mendapatkan tempat di kalangan anak muda adalah dari kelompok-kelompok marjinal yang kebanyakan dari orang-orang yang belum mengenal agama Islam secara utuh dan keluarga sekular atau orang yang baru masuk Islam dalam rangka mencari identitas dirinya dalam Islam<sup>52</sup>. Mereka menemukan suasana keislaman yang menurut mereka adalah pengalaman yang sempurna dan paling benar. Itu sebabnya kelompok-kelompok seperti ini mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan radikal seperti mencaci maki pemerintah yang sah, mencaci maki ulama yang bersebarangan dengan mereka dan melakukan ledakan bom bunuh diri sebagai refleksi kesempurnaan ajaran agama.

Selain itu munculnya Pesantren puritan yang eksklusif dan tidak ramah terhadap budaya setempat telah merebak di kota-kota hingga desa. Militansi yang berlebihan dari sekelompok muslim dengan dalih “dakwah” telah menjadikan pesantren bercita rasa menakutkan. Kelompok organisasi jihad seperti MMI yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asir, JAT (Jama’ah Anshorut Tauhid), JI (Jama’ah Islamiyah), dan JAS (Jama’ah Anshorut Syariat) merupakan wujud produk pesantren yang sudah tercerabut dari nilai-nilai Islam moderat yang kemudian hari melahirkan kelompok ekstrem dengan melakukan bom bunuh diri seperti peristiwa bom Bali dan bom Sarinah.<sup>53</sup>

Padahal, selama ini Pesantren mempunyai citra teduh dan santun dalam menggembleng santri memahami ajaran Islam.<sup>54</sup> Padahal awal kehadiran pesantren bukan sebatas sebagai pembelajaran ajaran Islam, tapi juga menjaga kearifan lokal dengan tetap menjaga budaya setempat dengan tetap berdampingan ajaran-ajaran agama dalam wujud yang inklusif seperti acara kenduri, selamatan, maulid nabi, Isra Mi’raj, bacaan al-Barjanzi ketika memberi nama anaknya.

Berkaitan dengan radikalisme Said Aqil Siraj menjelaskan beberapa penyebab dari paham wahabi mengalami perkembangan pemahaman sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Siraj, “Mendahulukan Cinta Tanah Air.”

<sup>51</sup> “Said Aqil: Ajaran Wahabi Jadi Pintu Masuk Terorisme,” *CNN*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210330150057-20-623889/said-aqil-ajaran-wahabi-jadi-pintu-masuk-terorisme>.

<sup>52</sup> Martin Van Bruinessen, “Rakyat Kecil Islam Dan Politik,” Cetakan I (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013), 1-476.

<sup>53</sup> Abdul Malik, “Jaringan Intelektual Dan Ideologi Pesantren Salafi Jihadi : Studi Pada Daerah ‘Zona Merah’ Terorisme Di Bima,” *Ta’alim* 06, no. 02 (2018): 223-40, <https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.2.223-240>.

<sup>54</sup> Said Aqil Siraj, “Kembali Ke Pesantren,” *Kompas*, 10 Pebruari, 2012.

Agama menjadi radikal dan ekstrem karena ada beberapa penyebab yaitu: pertama, agama mengklaim diri ajarannya sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan agama lain tidak benar. Kedua penganutnya memiliki militansi terhadap para ulama dengan menerima segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh ulama tersebut. Ketiga, agama dijadikan alat legitimasi untuk meraih kekuasaan politik. Keempat, agama menjadi alat pembenar suatu perbuatan kejahatan. Kelima, agama dijadikan alat pembenar untuk melakukan perang suci dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak kemanusiaan dan lingkungan.<sup>55</sup>

Pendapat Said Aqil Siraj tersebut semakin memperjelas bahwa kelompok radikalisme bukan semata-mata ingin menjalankan ajaran Islam secara murni berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun sebenarnya lebih mengarah kepada strategi untuk mendapatkan kekuasaan. Sikap keras mereka terhadap kelompok-kelompok Islam moderat seperti NU, Tarbiyah, Al-Wasliyah sebagai strategi membangun opini di masyarakat agar mereka tertarik terhadap perjuangan syariat yang benar dan sesuai dengan sumber hukum Islam asli. Penggiringan opini melalui ceramah, tulisan-tulisan di media sosial, media massa dan media elektronika sebagai bentuk perang terbuka dalam pemikiran untuk menghancurkan ajaran Islam *washatiyah* di Indonesia.

Propaganda kaum radikalisme tentu saja sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang sangat sempurna. Bagi mereka ajaran Islam yang sempurna hanya pada tataran ibadah, sehingga menutup daya kreasi ilmu pengetahuan dan ilmu sosial serta produk budaya lain yang banyak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Namun mereka menutup telinga ajaran tersebut. kegarangan kaum radikalisme seperti isis yang telah menghancurkan artefak budaya di berbagai negara Timur Tengah terus menjalar pada kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia dengan menggugat amaliah kaum nahdiyyin, mengharamkan kegiatan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sampai pada pengharaman menyanyikan lagu Indonesia raya dan hormat kepada bendera merah-putih.<sup>56</sup>

Menurut Said Aqil Siraj, Islam bukanlah agama akidah dan syariat semata. Persentase akidah dan syariat hanya 10%, sedangkan kandungan lain adalah peradaban akhlak dan budaya. Tugas umat muslim tidak melulu mendoktrinkan akidah-syariat (halal-haram) atau melahirkan fatwa sesat-menyesatkan, tetapi juga bagaimana doktrin dengan kebenaran ilmiah, bukan dogma kaku akibat "kalap teks".<sup>57</sup> Seharusnya, Islam harus merespon kitab sucinya dengan nilai-nilai peradaban yang jauh lebih penting dalam rangka mengisi kemerdekaan. Itu sebabnya pesantren tradisional yang dibangun oleh para ulama terkenal dengan Islam ramah dan sudah diarahkan sebagai komponen bagi pembaruan masyarakat. Dan, pembaruan yang diungkapkan oleh pesantren itu melalui proses yang lentur, tidak kaku, atau menutup diri terhadap dunia luar. Inilah yang justru menumbuhkan sikap para santri untuk terbuka wawasannya, menerima dan sekaligus kritis terhadap gejala-gejala baru yang muncul.<sup>58</sup> Disini letak pentingnya pemikiran yang berwawasan moderat dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia saat sekarang ini.<sup>59</sup>

Itu sebabnya Islam yang dibangun oleh para ulama Nusantara adalah Islam yang tetap menjaga keberadaan NKRI dengan selalu kritis sebagai wujud amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan konsep tersebut bagi kelompok radikalisme ditafsirkan sebagai upaya mencari

---

<sup>55</sup> Qurtuby, "Calling for an 'Islamic Protestantism' Calling For " Islamic Protestantism " In Indonesia And Beyond Towards Democratic and Pluralistic Islam."

<sup>56</sup> Alif Jabal Kurdi, "Islam Nusantara: Solusi Menyikapi Problem Radikalisme Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (2019): 55-76.

<sup>57</sup> Siraj, "Kembali Ke Pesantren."

<sup>58</sup> Siraj.

<sup>59</sup> Zakiyuddin Baidhaw, "Reconstructing the Integration between Islam and Wasathiyah Based Social Science : An Epistemological Approach," *Millaat, Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 35-52, <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i1.5976>.

kebenaran dengan kekerasan dengan main sendiri. Suatu tindakan yang mengingatkan kembali pada kelompok khawarij yang muncul pada awal-awal sejarah Islam.<sup>60</sup>

Pemahaman bahwa Islam tidak mengajarkan pemberontakan atau kudeta pemikiran Said Aqil Siraj memperlihatkan bahwa dia lebih mengutamakan proses suksesi kekuasaan negara secara normal berdasarkan aturan perundang-undangan. Hal ini tentu merujuk pada realita sejarah kekuasaan Islam pada masa lalu yang sering melakukan kudeta pada masa kekhalifahan hanya menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Selain meninggalkan sejarah yang tidak baik bagi perjalanan politik bangsa, juga kudeta akan memungkinkan terjadi kekosongan kekuasaan. Padahal dalam konsep Islam dalam keadaan apapun, masyarakat tetap dalam berjamaah apalagi dalam konteks yang sangat penting terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 4. KESIMPULAN

Pemikiran Politik Islam Nusantara Said Aqil Siraj tidak sebatas pada pemaknaan Islam dalam sebuah karakter positif yang telah membentuk suatu perilaku kekhasan masyarakat Islam yang moderat, toleran, dan mudah bersinergi dengan sesama masyarakat sebagai hasil peradaban jangka panjang masa lalu sebagai hasil pertemuan tiga peradaban besar, yaitu Hindu, Budha dan Islam. Namun juga berkaitan dengan cara pandangnya terhadap politik kebangsaan dari sudut pandang agama Islam. Menurutnya, ada tiga prinsip politik Islam nusantara yaitu: pertama, prinsip melakukan jihad mempertahankan eksistensi NKRI yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa. Beragam gerakan ideologi transnasional telah menyusup ke berbagai aspek kehidupan sangat membahayakan keutuhan NKRI, karena sudah saatnya semua harus melawan secara terang-terangan dan tegas dalam segala cara termasuk melalui media sosial. Kedua prinsip keberagaman suku, agama, dan budaya sebagai prinsip dasar dalam konteks ke-Indonesia-an yang beragam dalam sejarah berdirinya Negara Indonesia, konstitusi harus melindungi seluruh warga dan sama kedudukan dalam hak dan kewajiban. Ketika konstitusi hanya melindungi dan condong kepada kelompok mayoritas (atau minoritas sekalipun) berarti telah menempatkan ketidakadilan. Sikap tersebut jelas sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketiga, prinsip kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dengan konstitusional dan menolak dengan keras kritik yang mengarah kepada tindakan makar atau bughot.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul, Hasnan Bachtiar, Ahmad Nur Fuad, Tongat, and Wahyudi. "Minority Muslims and Freedom of Religion: Learning from Australian Muslims' Experiences." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 295-326. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.295-326>.
- Asni. "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 54-69. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/699>.
- Baharun, Hasan. "Pendidikan Multikultural Dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 37-51.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Reconstructing the Integration between Islam and Wasathiyah Based Social Science : An Epistemological Approach." *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 1 (2021): 35-52. <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i1.5976>.
- Bruinessen, Martin Van. "Rakyat Kecil Islam Dan Politik," Cetakan I., 1-476. Yogyakarta:

---

<sup>60</sup> Said Aqil Siraj, "Kesalehan vs Kemungkaran," *Kompas*, 07 Mei, 2010.

Penerbit Gading, 2013.

- Chaidar, Al. "Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII SM Kartosoewirjo Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama Dan Orde Baru," 1999.
- Fadlullah, Muhammad Endy. "Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah Dalam Perspektif Said Aqil Siradj." *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 33-43. <https://doi.org/10.31538/nidhomulhaq.v3i1.107>.
- Fajar. "Demokrasi Politik Sampai Warisan Radikalisme; Sebuah Pengetahuan Nasionalisme Era Milenial." *Jurnal Politik Profetik* 6, no. 1 (2018): 74.
- Ghozali, Imam. "Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia; Muhammadiyah Dan NU Vs FPI Dan HTI." *Al-Qalam* 37, no. 1 (2020): 27-48.
- . "Memahami Format Demokrasi Model Khawarij Di Indonesia ( Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019)." *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2020): 1.
- Ghozali, Imam, and Junaidi. "Political And Nationalism Of Gp Ansor In Facing The Persecution Of Kirab Satu Negeri In The Meranti." *Al-Tahrir* 20, no. 2 (2020): 307-28.
- Hassan, Farooq. "The Concept of State and Law in Islam." In *University Press of America*, 41. New York, 1981.
- Hasyim, A. *Kritik Terhadap Teologi Wahabiyyah Di Indonesia Dalam Pemikiran Said Aqil Siradj*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49955>.
- Imam Ghozali, Zulfikar Hasan, Chanifudin, Rahaman. "Ideal Country According To Afifuddin Muhajir: Analysis Of The Scientific Speech Of The Hanouris Causa Doctoral Award At Uin Walisongo Semarang Indonesia." *Malaysian Journal For Islamic Studies* 5, no. 1 (2021): 27-39.
- datdut.com. "Ini 5 Pemikiran K.H. Said Aqil Siradj Yang Dianggap Nyeleneh," n.d.
- Khasanah, Farista Zulfa. "Studi Pemikiran Said Aqiel Siradj Tentang Kesetaraan Hak-Hak Politik Perempuan Untuk Menjadi Kepala Negara." UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Kurdi, Alif Jabal. "Islam Nusantara: Solusi Menyikapi Problem Radikalisme Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (2019): 55-76.
- Kurniawan, Asep. "Metodologi Penelitian Pendidikan." edited by Nita Nur M, 1-408. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2018.
- Malik, Abdul. "Jaringan Intelektual Dan Ideologi Pesantren Salafi Jihadi : Studi Pada Daerah ' Zona Merah ' Terorisme Di Bima." *Ta'allum* 06, no. 02 (2018): 223-40. <https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.2.223-240>.
- Mawardi, Ahmad Imam. "Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan," 2. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muhajir, Afifuddin. "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila Dari Aspek Nushush Dan Maqashid); Orasi Ilmiah Penganugerahan Doctor HC" (UIN Wali Songo Semarang, January 20, 2021)." Semarang, 2021.
- Mutiara Fahmi. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran" 2, no. 1 (2017): 49.
- Nayiroh, Luluatu. "Pemikiran Dan Aktivitas Dakwah Prof. Dr. K.H Said Aqil Siroj." *Skripsi*, 2013, 1-123.

- Qurtuby, Sumanto Al. "Calling for an 'Islamic Protestantism' Calling For " Islamic Protestantism " In Indonesia And Beyond Towards Democratic and Pluralistic Islam." *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 01 (2008): 151-77.
- Qurtuby, Sumanto Al. "Public Islam in Southeast Asia: Late Modernity, Resurgent Religion, and Muslim Politics." *Studia Islamika* 20, no. 3 (2013): 399-442. <https://doi.org/10.15408/sdi.20.3.511.399-442>.
- Ridwan, Benny, Iswandi Syahputra, Azhari Akmal Tarigan, Fatahuddin Aziz Siregar, and Nofialdi. "Islam Nusantara, Ulemas, and Social Media: Understanding the Pros and Cons of Islam Nusantara among Ulemas of West Sumatera." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (2019): 163-88. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V9I2.163-188>.
- Sadjali, Munawir. "Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran." In *UI-Press*, 140. Jakarta, 2011.
- Sahasrad, Herdi, Yanuardi Syukur, Dedy Tabrani, and Al Chaidar. "Reviewing Al-Qaeda's Infiltration in Indonesia: A Historical Reflection." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 27, no. 2 (2019): 395-424. <https://doi.org/10.21580/ws.27.2.3739>.
- "Said Aqil: Ajaran Wahabi Jadi Pintu Masuk Terorisme." *CNN*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210330150057-20-623889/said-aqil-ajaran-wahabi-jadi-pintu-masuk-terorisme>.
- Samsuddin, M. Din. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Setiawati, Siti Mutiah. "Democratic Political Contestation: State, Islam and Media in Indonesia's Reformative Era." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 34-50. <https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.34-50>.
- Siradj, Said Aqil. "Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri." Jaka: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Siraj, Said Aqil. "Kembali Ke Pesantren." *Kompas*, 10 Pebruari, 2012.
- . "Kesalehan vs Kemungkaran." *Kompas*, 07 Mei, 2010.
- . "Mendahulukan Cinta Tanah Air." *Kompas*, 11 April, 2015.
- . "Nasionalisme Islam Nusantara." In *Kompas*, edited by Abdullah Ubaid Mohammad Bakir, 1-275. Jakarta: Kompas Media Utama, 2015.
- . "Resolusi Jihad, Melawan Lupa." *Kompas*, 22 Oktober, 2011.
- Sirry, Mun'im A. "Membendung Militansi Agama, Iman Dan Politik Dalam Masyarakat Modern," 3. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sukarja, Ahmad. "Piagam Madinah Dan UUD Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk." In *Sinar Grafika*, 2. Jakarta, 2012.
- Sunaryo, Agus. "Ushul Fiqh Dan Perubahan Sosial Telaah Kritis Epistemologi Fiqh Kontemporer." In *Cetakan Pertama*, 72-73. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018.
- Tuhri, Mufdil, Samsul Maarif, and Rikardo Simarmata. "Adat, Islam and the Idea of Religion in Colonial Indonesia." *Al Albab* 9, no. 2 (2020): 158-78.
- Wahid, Abdurrahman. "Kata Pengantar (1) Mati Ketawa Cara Rusia." In *Sekadara Mendahului, Bunga Rampai Kata Pengantar*, edited by Tri Agus S Siswowiharjo, 53-56. Bandung: Nuansa, 2011.

- . “Musuh Dalam Selimut.” In *Ilusi Negara Islam (Ekspansi Gerakan Transnasional Di Indonesia)*, edited by Abdurrahman Wahid, 19. Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, 2019.
- Wahid, Abdurrahman dan Daisaku Ikeda. “Dialog Peradaban Untuk Toleransi Dan Perdamaian,” 170. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Waskito, Tejo. “Geneologi Revolusi Paradigma Pemikiran Keislaman Nahdlatul Ulama.” *AL-A'RAF* XV, no. 2 (2018): 1-35. <https://doi.org/10.30649/fisheries.v2i2.43>.
- Yenigun, Halil Ibrahim. *Islamic Liberation Theology. American Journal of Islam and Society*. Vol. 27, 2010. <https://doi.org/10.35632/ajis.v27i3.1309>.